



Hilangnya Musyawarah Pada Konflik Antarmahasiswa UNIMED Fakultas Teknik Dan Fakultas Ilmu Keolahragaan

The Loss Of Deliberation In The Conflict Between UNIMED Students Of The Faculty Of Engineering And The Faculty Of Sports Science

Angeline Sembiring¹, Intan Sitio², Srimori Sihole³

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan

Email: angelinepelawi47@gmail.com¹, intanyohanositio@gmail.com², srimorisihole@gmail.com³

Abstract

Article Info

Article history :

Received : 27-11-2025

Revised : 28-11-2025

Accepted : 30-11-2025

Pulished : 02-12-2025

This study aims to analyze the absence of deliberation in the conflict between students of the Faculty of Engineering and the Faculty of Sport Science (FIK) at Medan State University (Unimed). This conflict negatively impacted campus life, disrupting academic activities, damaging social relationships, and tarnishing the university's image. The research method used was descriptive with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with students involved or who had relevant information. The results showed that the absence of deliberation was caused by blocked communication, polarization of opinion, distrust, and a lack of effective facilitation. Conflict resolution efforts undertaken by the university and student organizations have not been fully successful. Therefore, this study recommends improving communication, strengthening the role of student organizations, peace education, the formation of an independent mediation team, and fair law enforcement to prevent similar conflicts in the future and rebuild trust among Unimed students.

Keywords: Deliberation, Student Conflict, Faculty of Engineering

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hilangnya musyawarah dalam konflik antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Negeri Medan (Unimed). Konflik ini berdampak negatif terhadap kehidupan kampus, mengganggu aktivitas akademik, merusak hubungan sosial, dan mencoreng citra universitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang terlibat atau memiliki informasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya musyawarah disebabkan oleh komunikasi yang tersumbat, polarisasi opini, ketidakpercayaan, dan kurangnya fasilitasi yang efektif. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak universitas dan organisasi kemahasiswaan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi, penguatan peran organisasi kemahasiswaan, pendidikan perdamaian, pembentukan tim mediasi independen, dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan membangun kembali kepercayaan di antara mahasiswa Unimed.

Kata kunci: Musyawarah, Konflik Mahasiswa, Fakultas Teknik

PENDAHULUAN:

Universitas Negeri Medan (UNIMED), sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Sumatera Utara, memiliki peran sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Konflik antar mahasiswa, khususnya antar fakultas, menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan bijaksana.



Fenomena konflik mahasiswa bukanlah hal baru dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia. Berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, persaingan sumber daya, perbedaan pandangan ideologis, hingga masalah komunikasi dapat menjadi pemicu konflik. Dampak yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari gangguan aktivitas akademik, kerusakan fasilitas kampus, hingga perpecahan solidaritas mahasiswa. Salah satu aspek penting yang seringkali terabaikan dalam penyelesaian konflik mahasiswa adalah musyawarah. Musyawarah, sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan dialog dan konsensus, memiliki potensi besar dalam meredam konflik dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, dalam banyak kasus, musyawarah justru hilang atau tidak berjalan efektif, sehingga konflik berlarut-larut dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Studi kasus ini akan membahas secara mendalam tentang hilangnya musyawarah dalam konflik antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Unimed. Konflik ini dipilih karena mencerminkan kompleksitas permasalahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kampus, serta dampaknya yang signifikan terhadap akademik dan sosial. Melalui analisis studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab hilangnya musyawarah, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perspektif dan pengalaman mahasiswa yang terlibat dalam konflik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi resolusi konflik yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Unimed.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam peristiwa nyata yang terjadi di lingkungan kampus, yaitu konflik antara mahasiswa Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Negeri Medan (UNIMED). Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab konflik, dinamika yang berlangsung, serta persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai sila ke-4 Pancasila, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama:

1. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan mahasiswa dan dosen yang terkait guna mendapatkan data yang kaya, mendalam, serta langsung dari sumber. Teknik wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan sesuai konteks dan mendapatkan respon yang jujur dari informan.
2. Kedua, observasi langsung dilakukan untuk mengamati suasana dan interaksi mahasiswa di tempat kejadian serta di sekitar lingkungan kampus.



3. Ketiga, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan artikel ilmiah, laporan, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat analisis dan memperoleh gambaran lengkap mengenai konflik yang terjadi.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, pemaknaan, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis meliputi coding data berdasarkan tema-tema utama seperti faktor penyebab konflik, persepsi mahasiswa, hambatan musyawarah, serta solusi yang diusulkan. Analisis ini akan dilakukan secara interpretatif, dengan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, verifikasi data dari informan (respon member check), serta penyajian laporan yang sistematis dan transparan. Proses penelitian akan dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir hasil penelitian dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNIMED, yang berujung pada hilangnya musyawarah, bukanlah sekadar insiden yang mengganggu ketertiban kampus. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi cerminan betapa rapuhnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada tergerusnya musyawarah, strategi resolusi konflik berbasis Pancasila, serta peran kemitraan strategis, akan diuraikan pada pembahasan ini dengan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam membangun kembali nilai sila ke-4 pada mahasiswa UNIMED.

Sejalan dengan hal tersebut, Sari et al. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Sila Keempat Pancasila dalam Budaya Demokrasi di Kampus" (Jurnal Intelek Insan Cendikia) menemukan bahwa persepsi positif mahasiswa terhadap sila keempat Pancasila berkorelasi dengan budaya demokrasi yang lebih kuat di kampus. Hasil ini menggaris bawahi pentingnya menanamkan pemahaman yang mendalam tentang sila ini, bukan hanya sebagai konsep teoretis, tetapi sebagai landasan perilaku dan interaksi sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang sila keempat akan mendorong partisipasi aktif dalam musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik yang merusak, sehingga tercipta iklim kampus yang lebih demokratis dan harmonis. Untuk memahami secara komprehensif bagaimana konflik ini dapat terjadi dan bagaimana solusinya dapat dirumuskan, berikut beberapa identifikasi akar permasalahan yang mendasar, yaitu:

1. Akar Permasalahan Ketika Dialog Terhenti dan Prasangka Menguat

Hilangnya musyawarah dalam konflik ini bukan terjadi secara tiba-tiba, setelah kami mewawancara kedua belah pihak kami mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling terkait. Komunikasi yang tersumbat, di mana informasi bias dan prasangka lebih mendominasi daripada fakta dan pemahaman, menjadi hambatan utama dalam menciptakan dialog yang konstruktif. Polarisasi opini, yang membuat setiap kelompok merasa paling benar dan mengabaikan pandangan orang lain, semakin memperburuk situasi. Ketidakpercayaan, yang tumbuh subur akibat pengalaman masa lalu dan kurangnya transparansi, meruntuhkan fondasi musyawarah. Ditambah lagi,



kurangnya fasilitasi yang efektif, di mana tidak ada pihak ketiga yang netral dan kompeten untuk membantu memediasi konflik, membuat upaya penyelesaian menjadi sia-sia.

Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila juga menjadi faktor penting dalam konflik ini. Seperti yang ditegaskan oleh Saragih et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Permasalahan antara Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Teknik UNIMED sebagai Akibat Kurangnya Kesadaran akan Nilai–Nilai Pancasila" (Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat), konflik antar mahasiswa seringkali merupakan cerminan dari kurangnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan, termasuk sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan toleransi. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga oleh kegagalan individu dalam mengamalkan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama.

Lebih jauh lagi, pemahaman yang superficial terhadap nilai-nilai Pancasila, meskipun terkesan tinggi dalam survei, tidak menjamin implementasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Pancasila seolah hanya menjadi hafalan di bibir, bukan pedoman yang membimbing tindakan dan interaksi. Inilah akar masalah yang perlu diatasi, yaitu bagaimana mengubah pemahaman kognitif menjadi internalisasi nilai-nilai yang mendalam dan terwujud dalam tindakan nyata.

Terkait dengan upaya internalisasi nilai, Yessi Eka Pratiwi dan Sunarso (2018) dalam jurnal Sosiohumaniora meneliti tentang "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN FKIP UNILA". Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi musyawarah mufakat yang diadaptasi dari budaya lokal dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan iklim akademik yang positif, yang pada gilirannya mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan tradisi ini di tengah kesibukan dan preferensi mahasiswa terhadap cara-cara yang lebih praktis.

2. Membangun Kembali Musyawarah dengan Strategi Resolusi Konflik Berbasis Pancasila

Untuk membangun kembali jembatan musyawarah yang runtuh, diperlukan strategi resolusi konflik yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk memahami lebih mendalam tentang sila keempat Pancasila, penting untuk merujuk pada tinjauan filosofis yang dilakukan oleh Samosir et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila" (Seminar Nasional Filsafat Teologi). Penelitian ini menekankan bahwa kerakyatan harus dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berarti setiap keputusan harus didasarkan pada akal sehat, hati nurani, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat. Implikasi dari tinjauan ini adalah bahwa musyawarah bukanlah sekadar prosedur formal, tetapi juga proses yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak, serta komitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Langkah pertama adalah mentransformasi pendidikan Pancasila, dari sekadar teori menjadi aksi nyata. Pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi reflektif harus menjadi bagian integral dari kurikulum, sehingga mahasiswa dapat mengalami sendiri bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam



mengatasi masalah nyata. Selain itu, pelatihan resolusi konflik harus diberikan kepada seluruh mahasiswa, dengan fokus pada pengembangan keterampilan mendengarkan aktif, komunikasi asertif, negosiasi, mediasi, dan empati. Keterampilan-keterampilan ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berinteraksi secara konstruktif, memahami perspektif orang lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Promosi dialog dan musyawarah juga menjadi kunci dalam membangun kembali musyawarah. Universitas harus menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi mahasiswa untuk berbagi perspektif, berdiskusi tentang isu-isu penting, dan mencari solusi bersama. Forum diskusi terbuka, kelompok studi, kegiatan kebudayaan, dan program pertukaran mahasiswa dapat menjadi wadah yang efektif untuk memfasilitasi dialog dan musyawarah. Organisasi kemahasiswaan, sebagai agen perubahan di kampus, juga perlu diberdayakan. Universitas harus memberikan pelatihan kepemimpinan, dukungan dana dan sumber daya, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kampus. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan dapat menjadi motor penggerak dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan mengelola konflik di kampus.

Terakhir, penegakan aturan yang adil dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Universitas harus mensosialisasikan aturan kampus secara jelas, memastikan proses penegakan dilakukan secara adil dan transparan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran.

3. Mengoptimalkan Dampak Pada Peran Kemitraan Strategis

Upaya membangun kembali musyawarah dan meneguhkan Pancasila tidak dapat dilakukan sendiri oleh universitas. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta, sangat penting untuk memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang diusulkan.

Kemitraan dengan pemerintah dapat membantu universitas mendapatkan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pendidikan Pancasila dan resolusi konflik. Kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan akses kepada keahlian dan jaringan yang lebih luas. Kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu universitas mendapatkan dukungan finansial dan mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Mengukur Keberhasilan Pada Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan

Keberhasilan implementasi strategi resolusi konflik berbasis Pancasila harus dievaluasi dan dimonitor secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas dan terukur harus ditetapkan untuk memantau dampak program, seperti penurunan jumlah konflik, peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan positif, dan peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila.

Metode pengumpulan data yang beragam, seperti survei, wawancara, dan analisis dokumentasi, harus digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang dampak program. Analisis data yang sistematis harus dilakukan untuk mengidentifikasi tren,



pola, dan area yang perlu ditingkatkan. Laporan berkala yang transparan dan akuntabel harus disusun dan disajikan kepada semua pihak terkait.

5. Menghadapi Tantangan Pada Strategi Mitigasi yang Proaktif

Implementasi strategi resolusi konflik berbasis Pancasila tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Resistensi dari mahasiswa atau pihak tertentu, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang efektif adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Untuk mengatasi resistensi, dialog terbuka dan pelibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, solusi kreatif dan efisien harus dicari, seperti mencari dana alternatif, memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi koordinasi yang kurang efektif, tim yang solid dan kompak harus dibangun, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas.

KESIMPULAN

Konflik antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, khususnya studi kasus yang melibatkan Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNIMED, menjadi potret nyata tentang tantangan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Hilangnya musyawarah dalam penyelesaian konflik tersebut bukan hanya sekadar insiden pelanggaran tata tertib kampus, melainkan sebuah indikasi adanya permasalahan mendasar terkait pemahaman, penghayatan, dan pengamalan prinsip-prinsip luhur bangsa. Akar masalahnya kompleks, mulai dari komunikasi yang kurang efektif, polarisasi pandangan yang ekstrem, hingga ketidakpercayaan yang menghambat dialog konstruktif. Lebih dari sekadar pemahaman teoretis, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata masih jauh dari harapan.

Namun, tantangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi mendalam dan mengambil langkah-langkah strategis guna memulihkan kembali budaya musyawarah serta memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Transformasi pendidikan Pancasila, pelatihan resolusi konflik yang komprehensif, promosi dialog dan musyawarah yang inklusif, pemberdayaan organisasi kemahasiswaan, penegakan aturan yang adil dan transparan, serta kemitraan strategis dengan berbagai pihak, menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem kampus yang lebih harmonis, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

KESIMPULAN

Perjalanan untuk membangun kembali jembatan musyawarah dan meneguhkan nilai-nilai Pancasila di UNIMED memang tidak akan mudah. Akan ada tantangan, hambatan, dan bahkan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Namun, dengan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, dan strategi yang terencana, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

Lebih dari sekadar menyelesaikan konflik, tujuan utama dari upaya ini adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Generasi yang mampu menjadi agen perubahan positif bagi bangsa dan negara, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.



Semoga studi kasus ini dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi mahasiswa UNIMED, serta perguruan tinggi lainnya di Indonesia, dalam mengatasi konflik mahasiswa dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus terutamanya sila ke-4 pancasila. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik, di mana nilai-nilai luhur bangsa menjadi landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagaol, TND, Wahyudi, B., & Tirto, D. (2022). Potensi Konflik Non-Realistik Dalam Konflik Antar Kelompok Organisasi Daerah (Organda) Mahasiswa Di Kota Makassar. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11 (3).
- Pratiwi, Y. E., & Sunarso, S. (2018). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP Unila. *Sosiohumaniora*, 20(3), 199-206.
- Puspita, D. R. PENYELESAIAN KONFLIK DALAM DINAMIKA KELOMPOK DENGAN TEKNIK MUSYAWARAH MUFAKAT.
- Samosir, O., Tinambunan, L., & Septiandry, R. (2023, May). KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila. In Seminar Nasional Filsafat Teologi (pp. 53-63).
- Saragih, D., Daulay, S., Pakpahan, I., Sihotang, Y., Marpaung, R., Siahaan, J., ... & Ayuni, S. (2024). *Analisis Permasalahan antara Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Teknik UNIMED sebagai Akibat Kurangnya Kesadaran akan Nilai–Nilai Pancasila*. Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2(2), 244-252.
- Sari, N. E., Nurliana, V., Manullang, B. M., Lianty, D. N., Prayogi, S., & Ardana, M. R. D. (2025). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Sila Keempat Pancasila dalam Budaya Demokrasi di Kampus*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6217-6225.